



Pemerintah
Kota Pontianak

2025 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



L K I P

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kota Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja BPBD Kota Pontianak selama tahun 2025, sekaligus menjadi sarana evaluasi internal terhadap capaian kinerja yang telah diraih maupun target yang belum sepenuhnya tercapai.

Pada tahun 2025, BPBD Kota Pontianak melaksanakan perhitungan mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Sebagai pengampu data, BPBD Kota Pontianak menggelar FGD bersama instansi terkait, kemudian melakukan penginputan data melalui aplikasi InaRISK. Hasil perhitungan tersebut diverifikasi oleh BPBD Provinsi dan selanjutnya diusulkan secara kolektif kepada BNPB untuk proses validasi. Berdasarkan hasil tersebut, Kota Pontianak memperoleh nilai IKD sebesar 0,59 dengan kategori sedang, serta Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 84,19 yang juga berada pada kategori risiko sedang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penggunaan anggaran yang telah dialokasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP ini memuat uraian mengenai perencanaan kinerja BPBD Kota Pontianak, capaian kinerja selama Tahun 2025, serta analisis terhadap strategi dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum, target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak pada Tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam penyusunan perencanaan, penetapan kebijakan, serta perumusan langkah-langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

Sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, saya berharap LKIP ini dapat menjadi sumber data dan informasi yang akurat dan bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang, serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan akuntabilitas kinerja BPBD Kota Pontianak secara menyeluruh. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada periode selanjutnya. Terima kasih.

Pontianak, 30 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK,



Ir. R. M. NASIR, MT

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19690416 199603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum	5
1. Pendahuluan	5
2. Susunan Organisasi	6
3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	7
5. Sumber Daya Keuangan	8
6. Sarana dan Prasarana	9
B. Permasalahan Utama (Strategic Isued)	10
C. Sistematika Pelaporan	12
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. PERJANJIAN KINERJA	16
C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	16
BAB III	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA	20
TUJUAN PERANGKAT DAERAH	22
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	22
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.	23
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD	24
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ..	24
5. Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	25
SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	27

2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	35
3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	40
4.Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)..	41
5.Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	41
B.REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV	44
PENUTUP	44
LAMPIRAN	46
LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Pada Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak melaksanakan program dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berlandaskan pada program-program BPBD Kota Pontianak serta mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Pontianak Tahun 2024–2026. Dengan demikian, seluruh dokumen perencanaan disusun secara selaras dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2025 pada hakikatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan BPBD Kota Pontianak dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki, melalui perencanaan strategis, penetapan target dan capaian kinerja, serta evaluasi kinerja yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Perjanjian Kinerja (PK) BPBD Kota Pontianak Tahun 2025.

2. Susunan Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pontianak di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pontianak. BPBD Kota Pontianak dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Struktur organisasi BPBD Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Adapun susunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut. :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK



Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, BPBD Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan administrasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2025 BPBD Kota Pontianak didukung oleh 48 orang ASN dan 1 orang tenaga kontrak atau jasa orang perorangan. Dari 48 orang ASN tersebut terdiri dari 27 orang PNS dan 21 orang PPPK dengan 39 orang jenis kelamin laki-laki dan 9 orang ASN dengan jenis kelamin perempuan.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol.Ruang	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	1	-	1
4.	Penata Tk.I (III/d)	6	1	7

5.	Penata (III/c)	2	1	3
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	4	2	6
7.	Penata Muda (III/a)	3	-	3
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	1	-	1
9.	Pengatur (II/c)	3	1	4
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
12.	V (PPPK)	17	4	21
	TOTAL	39	9	48

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

Kemudian berdasarkan pendidikannya, komposisi pegawai/ ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah lulusan S2 sebanyak 3 orang, lulusan S1 sebanyak 13 orang, lulusan diploma sebanyak 4 orang untuk ASN dan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 28 orang.

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah PNS						Total
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	-	-	-	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	-	-	-	-	-	1
3.	Pembina (IV/a)	-	1	-	-	-	-	1
4.	Penata Tk.I (III/d)	1	6	-	-	-	-	7
5.	Penata (III/c)	-	2	1	-	-	-	3
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	4	1	1	-	-	6
7.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	3	-	-	3
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	1	-	-	1
9.	Pengatur (II/c)	-	-	2	2	-	-	4
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
12.	V (PPPK)	-	-	-	21	-	-	21
	TOTAL	3	13	4	28	0	0	48

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

5. Sumber Daya Keuangan

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, maka pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp.5.580.678.427,00,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.3
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
BPBD Kota Pontianak Tahun 2025

NO	URAIAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	%
1.	BELANJA OPERASI	Rp. 6.309.223.409,00	Rp. 7.545.847.899,0	19,60
	- Belanja Pegawai	Rp. 3.146.711.899,00	Rp. 4.568.325.925,00	45,18
	- Belanja Barang dan jasa	Rp. 3.162.511.510,00	Rp. 2.977.521.974,00	-5,85
2.	BELANJA MODAL	Rp. 752.488.490,00	Rp. 697.500.890,00	-7,31
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 632.488.490,00	Rp. 577.500.890,00	-8,69
	- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 120.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	Rp. 7.061.711.899,00	Rp. 8.243.348.789,00	16,73

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang di miliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak :

a. Gedung Kantor

Sejak Januari 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menempati bangunan eks Kantor Penerangan di Jalan Let.Jend. Sutoyo No. 71 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia sesuai dengan fungsinya, yaitu :

- 1) Mobil operasional Kepala Pelaksana jenis mini bus APV tahun 2007 sejumlah 1 unit dalam kondisi baik;
- 2) Mobil operasional lapangan (mobil komando) penanggulangan bencana, jenis pick up Ford Ranger double cabin tahun 2007, dalam kondisi baik;
- 3) Mobil operasional lapangan jenis pick up tahun 2021, dalam kondisi baik;
- 4) Sepeda motor operasional sekretariat sejumlah 1 unit dalam kondisi baik

- 5) Sepeda motor operasional lapangan penanggulangan bencana jenis trail sejumlah 2 unit dan sebanyak 1 unit jenis sport (mega pro) dalam kondisi baik.
- 6) Sebanyak 2 Unit Perahu Polyethylene lengkap dengan mesin perahu kap 9,8 PK dan perlengkapannya dalam kondisi baik
- 7) Mobil Pemadam Kebakaran (Jenis Truck Roda 6) sejumlah 2 unit dalam kondisi baik namun perlu pemeliharaan lebih rutin karna mobil ini merupakan Hibah sejak tahun 1997.
- 8) Mobil Pemadam Kebakaran (Roda 4) sejumlah 2 unit, yaitu Isuzu Fire Jeep dan Toyota Kijang Pick Up dalam kondisi baik.
- 9) Sepeda Motor Operasional untuk petugas Damkar sejumlah 2 unit dalam kondisi baik.

c. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin bersumber dari ABPD Kota Pontianak sementara untuk peralatan penanggulangan bencana BPBD Kota Pontianak memiliki beberapa peralatan seperti peralatan pemadaman karhutla, peralatan pertolongan di air, tenda yang di dapat melalui pengadaan rutin bersumber dari APBD maupun Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perpindahan Aset Damkar ke BPBD Kota Pontianak dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/000.2.5/BAST/SATPOLPP/2025 pada tanggal 22 April 2025 dengan total 199 item sebagian besar dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan

B. Permasalahan Utama (Strategic Isuued)

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Pontianak yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun yang bersumber dari lingkungan eksternal. Isu-isu strategis tersebut adalah:

1) Faktor Internal

Faktor-faktor yang saat ini merupakan permasalahan BPBD Kota Pontianak dalam upaya penanggulangan bencana adalah:

- 1) Keterbatasan aparatur dari segi jumlah dan kualitas yang belum sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dalam penanggulangan Bencana;
- 2) Perlunya upaya penguatan kelembagaan mengingat BPBD memegang peranan strategis sebagai koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Belum tertintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah;
- 4) Masih kurangnya dukungan sistem dan proporsi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Faktor Eksternal

- 1) Kondisi wilayah Kota Pontianak yang berada di dataran rendah berpotensi mengalami bencana banjir dan kondisi tanah di beberapa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 – BPBD Kota Pontianak 12 Kawasan merupakan lahan gambut, memiliki potensi yang sangat tinggi terjadinya kebakaran lahan;
- 2) Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam penanggulangan bencana;
- 3) Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Pesatnya perkembangan pembangunan disertai kurangnya pengendalian pengaturan tata ruang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana;
- 5) Adanya perubahan iklim global sehingga berpotensi meningkatkan intensitas ancaman bencana;

C.Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini memuat latar belakang disusunnya LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, Sarana dan Prasarana yang dimiliki, permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi serta Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak pada tahun 2025 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Pontianak serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra 2024-2026 disusun sesuai dengan Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otono baru. Renstra merupakan implementasi dan penjabaran dari RPD tahun 2024 - 2026, yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPD Pemerintah Kota Pontianak.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis tahun 2024-2026, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

1. Visi Kota Pontianak

Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan ke depan menuju kondisi yang diharapkan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan visi pembangunan sebagai arah dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang penanggulangan bencana, BPBD Kota Pontianak senantiasa berupaya meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Peningkatan tantangan kebencanaan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat mendorong BPBD Kota Pontianak untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kinerja tersebut dilakukan melalui penerapan manajemen strategis yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, kinerja BPBD Kota Pontianak dapat dievaluasi secara objektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kota Pontianak.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan yang menggambarkan arah dan kondisi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak. Penetapan visi dimaksudkan untuk menyatukan langkah seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam menggerakkan sumber daya yang ada guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024–2026 disusun dengan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005–2025, yaitu:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

2. Misi Kota Pontianak

Misi merupakan pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pontianak. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005–2025 dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, termasuk BPBD Kota Pontianak, dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia.
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga.
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib

Dalam rangka mendukung pencapaian misi tersebut, BPBD Kota Pontianak berperan aktif terutama dalam peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana serta perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026, BPBD Kota Pontianak mengampu Tujuan ke-2 Kota Pontianak yakni **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib**. Untuk mencapai tujuan Kota tersebut BPBD mendukung sasaran ke-4 yaitu **Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota** yang dapat diukur dengan indikator **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 0,55 dengan kategori sedang. Untuk keterkaitan tujuan, sasaran dan target kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Rencana Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,50	0,55	0,60
		Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	44,12%	52,21%	69,12%

Sumber: Renstra BPBD Tahun 2024-2026

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah untuk mewujudkan kinerja yang terukur serta sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pada awal Tahun Anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2025. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Pontianak dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator Indeks Kapastias Daerah (IKD)	52,21%

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) dengan Wali Kota Pontianak. Perjanjian Kinerja, adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah / atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang

ditetapkan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2024 merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program / kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak beserta indikator sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kota Pontianak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tujuan : Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Derah (IKD)	0,55
2	Sasaran : Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator Indeks Kapastias Daerah (IKD)	52,21%

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

Bencana dapat mengganggu dan merusak hasil hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensi kerugiannya di masa yang akan datang. Potensi kerugian karena bencana disebut risiko bencana. Di Indonesia, risiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi negara ini yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (*Ring of Fire*) menyebabkan ratusan gunungapi dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di seluruh wilayah

Indonesia. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Indonesia terancam bencana longsor, banjir dan kekeringan. Untuk menurunkan indeks resiko bencana ada tiga komponen penting yaitu :

1. Menurunkan atau mencegah ancaman bencana yang ada (*Hazard*)

Di Kota Pontianak ada tiga ancaman bencana terbesar yaitu kebakaran lahan gambut, puting beliung dan banjir atau genangan. Kebakaran lahan gambut dan banjir dengan upaya structural non structural dapat dicegah atau dikurangi ancamannya.

2. Menurunkan Kerentanan terhadap bencana (*Vulnerability*).

Dalam menurunkan kerentanan terhadap bencana yang terjadi, ada tiga komponen utama yaitu kepadatan penduduk di daerah rawan bencana, kerugian material dan kerusakan lingkungan hidup akibat bencana. Komponen kepadatan penduduk di daerah rawan bencana dapat dilakukan dengan pelaksanaan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kota Pontianak yang memperhatikan ancaman bencana. Kerugian material akibat bencana dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerusakan Lingkungan hidup bisa diminimalkan dengan upaya pencegahan dan penanganan tanggap darurat bencana sehingga kerusakan tidak meluas.

3. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana (*Capacity*)

Untuk menghadapi bencana maka Kapasitas pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat perlu terus ditingkatkan, Kapasitas ini meliputi, penguatan kelembagaan dengan kebijakan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, peringatan dini, dan penguatan sumber daya. IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu Indeks Ketahanan, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk mendapatkan nilai IKD, BPBD kabupaten / kota diseluruh Indonesia dapat mengisi perangkat penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari tujuh prioritas dan 71 indikator. Proses simulasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan perhitungan IKD menggunakan perangkat lunak khusus yang sudah disediakan

Dari kegiatan ini, diharapkan daerah-daerah dengan risiko tinggi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi mengetahui kapasitas dirinya sendiri dan mampu menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menurunkan IRBI. Pada gilirannya, IKD yang menjadi salah satu unsur dalam KRB dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah. Dengan penurunan IRBI, adanya KRB dan kebijakan penanggulangan bencana, maka diharapkan terwujud kabupaten atau kota yang tangguh menghadapi bencana

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pontianak melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dihitung dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2025 dengan realisasinya. Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak khususnya BPBD Kota Pontianak Tahun 2025 mencakup 5 (lima) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran serta capaian kinerja sasaran Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir.

3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2025 dengan Standar Nasional.
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Adapun yang akan dibahas dalam LKIP ini adalah capaian Indikator Tujuan Strategis BPBD Kota Pontianak yaitu “Indeks Ketahanan Daerah” atau IKD dan “Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD” di Tahun 2025.

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara keseluruhan, Kinerja BPBD dapat diukur melalui peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Pontianak. Dimana melalui nilai ini tercermin ketangguhan Kota Pontianak dalam menghadapi bencana. Capaian Target Tujuan Startegis BPBD Kota Pontianak dengan indikator IKD dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Tujuan Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,55	0,59	107%

Sumber : Data IKD BNPB

Dari tabel diatas Capaian Tujuan Strategis BPBD Kota Pontianak yang juga merupakan salah satu Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, tercermin dengan pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah. Dimana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah terhadap kemampuannya dalam menghadapi bencana, dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu Indeks Ketahanan, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten / kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk tahun 2024 realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak adalah 0,55. Dengan kata lain Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak berada dalam kategori “Sedang”, dimana semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga

Kapasitas / Ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Realisasi nilai IKD Kota Pontianak Tahun 2025 meningkat pesat sebesar 0,59 lebih tinggi dari nilai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 yakni sebesar 0,55 sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak adalah **“Sangat Berhasil”**, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **107%**.

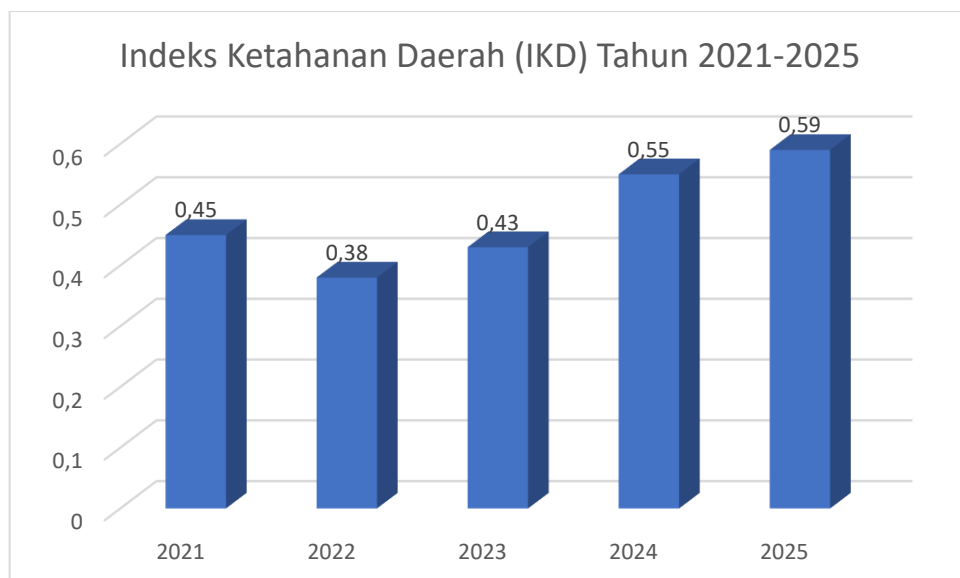
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari perbandingan dibawah ini:

Tabel 3.2
Tabel perbandingan Realisasi Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Derah (IKD)	0,55	0,43	0,55	0,59

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis di Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Sebelumnya



Sumber : Buku IRBI BNPB 2025

Dalam 5 tahun terakhir nilai Indeks Ketahanan Daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun selalu berada dalam kategori sedang

tapi di akhir tahun 2025 nilai IKD ternyata meningkat dalam 2 tahun terakhir dan naik cukup tinggi dari capaian tahun sebelumnya 0,55 menjadi 0,59. Peningkatan ini merupakan bukti komitmen BPBD Kota Pontianak dalam meningkatkan Ketahanan Kota Pontianak dalam urusan penanggulangan bencana.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Target Capaian Jangka Menengah di Dokumen RENSTRA sudah hampir mencapai target yang ditetapkan. Lebih jelasnya perbandingan Capaian Kinerja dengan Target dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Derah (IKD)	0,55	0,59	0,60	98,33

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target capaian IKD pada Tahun 2025 adalah sebesar 0,55 sementara realisasinya sudah melebihi target yaitu senilai 0,59. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 nilai akhirnya adalah 0,60 artinya capaian ini sudah memenuhi 98,33% dari target Renstra sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.4

Realisasi Indikator Kinerja Utama 2025 dengan Target Nasional (jika ada)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Provinsi
1	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Derah (IKD)	0,59	0,58

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2025

Pemenuhan dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat ketahanan daerah terhadap risiko bencana. IKD menggambarkan sejauh mana kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana melalui penguatan aspek kebijakan, kelembagaan, pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan darurat bencana.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKD Kota Pontianak tahun 2025 mencapai 0,59, lebih tinggi dibandingkan dengan target Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,58. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum menetapkan target nasional secara spesifik untuk indikator IKD, perbandingan dengan target provinsi dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja daerah.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan ketahanan daerah terhadap bencana di Kota Pontianak telah berjalan dengan baik dan melampaui target pembandingan. Dengan demikian, kinerja indikator IKD Kota Pontianak tahun 2025 masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**.

5. Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya keberhasilan maupun adanya kegagalan dalam pencapaian kinerja tentu disebabkan adanya faktor-faktor tertentu. Berikut adalah penyebab dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian dan langkah pengoptimalannya:

Tabel 3.5
Tabel Analisis Penyebab Peningkatan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Daerah	Tingginya partisipasi Instansi terkait akan nilai IKD Kota Pontianak	Perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan	Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait penanggulangan bencana, terutama untuk mendapatkan data dukung untuk meningkatkan nilai IKD

				upaya sebelum kejadian bencana.	
--	--	--	--	------------------------------------	--

SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Strategis BPBD Kota Pontianak dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	52,21%	66,18%	127%

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

Dari tabel diatas Sasaran BPBD Kota Pontianak adalah Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD dengan target 52,21%. Sasaran ini merupakan turunan dari Nilai IKD yang berhasil di capai Kota Pontianak. Perhitungan ini dilakukan dengan cara memfilter dari 71 Indikator Ketahanan Daerah yang dikeluarkan oleh BNPB, BPBD Kota Pontianak menentukan 34 dari 71 Indikator tersebut akan direalisasikan dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tertera dalam target sasaran kinerja RENSTRA 2024-2026. Masing-masing indikator memiliki 4 level pertanyaan yang harus dijawab dan dilampirkan bukti dukungunya. Total pertanyaan dari 71 indikator IKD adalah 284 pertanyaan sehingga dengan target 34 indikator, BPBD Kota Pontianak hanya perlu menjawab 136 pertanyaan dalam kuesioner IKD yang dikeluarkan oleh BNPB. Hal ini dilakukan agar BPBD Kota Pontianak fokus dalam pelaksanaan kinerjanya.

Penetapan 34 indikator tersebut berdasarkan kemampuan BPBD Kota Pontianak dalam melaksanakan sasaran dari masing-masing prioritas. Sasaran masing-masing prioritas dapat diterjemahkan kedalam bentuk kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan di tahun 2025. Sedangkan ke 37 indikator lainnya tidak ditetapkan sebagai sasaran strategis BPBD Kota Pontianak, dikarenakan perbedaan jenis ancaman bencana sehingga tidak relevan jika diterapkan di Kota Pontianak.

Persentase 34 indikator IKD dengan target 52,21% dan realisasi 66,18% pada tahun 2025 berarti BPBD Kota Pontianak telah melaksanakan perhitungan nilai IKD dan mencapai nilai indeks 0,59 yang artinya 90 dari 136 pertanyaan berhasil dijawab sehingga hasil realisasinya adalah 66,18%, (90 dari 136).

Realisasi capaian kinerja indikator ini berada diangka 66,18% sementara tergetnya adalah 52,21% sehingga realisasi ini sudah melebihi target dengan persentase capaian kinerja 127% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apala didukung pembiayaan yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi pengguna sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut

Tabel 3.7
Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.174.241.670	836.903.547	71.27		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	816.807.770	751.702.196	92.03		
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.252.299.349	5.119.051.920	81.87		
		TOTAL	8.243.348.789	6.707.657.663	81.37	127	18.63

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi BPBD Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp. 6.707.657.663,- atau sekitar 81,37% dari total pagu Rp. 8.243.348.789,- dan telah berhasil mencapai

target kinerja OPD sebesar 127, artinya BPBD Kota Pontianak telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 18,63 % untuk tahun anggaran 2025.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran strategis BPBD Kota Pontianak yaitu meningkatnya Penanggulangan Bencana ini diwujudkan melalui 2 Program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Dalam 2 Program tersebut terdapat 5 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di BPBD Kota Pontianak sudah tersinkronisasi dengan SPM Sub urusan Bencana. Keseluruhan program dan kegiatan ini juga mendukung peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Pontianak. Secara lebih jelas, faktor tercapainya keberhasilan maupun kegagalan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang penanggulangan bencana dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Tabel Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	Program Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
		100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	250 Orang	416 Orang	166%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3 Kawasan	3 Kawasan	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	80 Orang	17 Orang	21,25 %	Realisasi indikator kinerja mencapai 21,25% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja belum sepenuhnya tercapai , sehingga masih diperlukan upaya peningkatan pada periode berikutnya.
	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200 Orang	200 Orang	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	15 Unit	15 Unit	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200 Orang	477 Orang	238%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 238%, lebih dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	275 Orang	477 Orang	173%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 173%, lebih dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak terjadi kondisi darurat bencana yang memerlukan aktivasi sistem komando.
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 Unit	5 Unit	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100 Orang	150 Orang	150%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 150%, lebih dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut tercapai dan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" .

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pontianak pada tahun 2025 berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Mayoritas indikator kinerja pada program penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan informasi rawan bencana, serta penyelamatan dan evakuasi korban menunjukkan realisasi sebesar 100% atau lebih, sehingga masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPBD Kota Pontianak.

Beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian di atas 100%, seperti pada kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, serta penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Capaian tersebut terjadi karena meningkatnya kebutuhan layanan penanggulangan bencana di masyarakat serta respons cepat BPBD dalam menangani kejadian bencana yang terjadi selama tahun berjalan.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target, khususnya pada kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota yang hanya mencapai 21,25% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan, penyesuaian kebijakan, serta faktor pendukung lainnya. Capaian tersebut menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti melalui peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

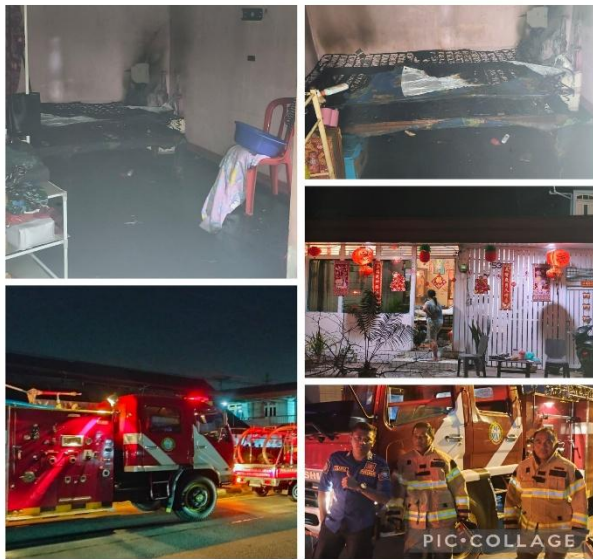
Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan BPBD Kota Pontianak tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, serta berkontribusi signifikan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, BPBD Kota Pontianak melampirkan dokumentasi pendukung yang menggambarkan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti fisik capaian kinerja, baik dalam bentuk dokumen administratif, laporan kegiatan, maupun dokumentasi.



Gambar 3.1 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana kepada Masyarakat Tahun 2025





Gambar 3.2 Kegiatan Respon Cepat, Pencarian, Distribusi Logistik Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana



Gambar 3.3 Pelatihan dan Gladi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Dokumentasi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Pontianak Tahun 2025 telah dilaksanakan secara nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung capaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan untuk melihat kecenderungan kinerja BPBD Kota Pontianak secara berkelanjutan. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk menilai konsistensi pelaksanaan penanggulangan bencana serta mengidentifikasi perkembangan, peningkatan, maupun capaian kinerja dari waktu ke waktu.

Perbandingan capaian indikator kinerja dilakukan selama tiga tahun terakhir, yaitu Tahun 2023, 2024, dan 2025, dengan mempertimbangkan kondisi awal serta perubahan capaian pada masing-masing indikator. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Pontianak dalam mendukung pencapaian sasaran strategis

Tabel berikut dibawah ini menggambarkan rekapitulasi perbandingan bagaimana Pemenuhan 34 Indikator IKD yang merupakan ranah BPBD Kota Pontianak tersebut yang terpenuhi di tahun 2023 - 2025:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis di Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Prioritas	Indikator		Pertanyaan	Kondisi Awal	2023	2024	2025
PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	1	1	1	1	2
			2	1	1	1	1
			3	1	1	1	1
			4	1	0	0	1
	2	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	5	1	1	1	2
			6	1	1	1	1
			7	0	1	1	1
			8	0	0	0	1
	3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	9	0	0	1	2
			10	0	1	1	1
			11	0	0	0	0
			12	0	1	1	0
	4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	13	1	0	1	2
			14	0	1	1	1
			15	0	0	0	0
			16	0	1	1	0
	5	Peraturan Daerah tentang RPB	17	1	1	1	2
			18	0	1	1	0
			19	0	0	1	0
			20	0	1	1	0
	7	BPBD	25	1	1	1	2
			26	1	1	1	1
			27	1	1	1	1
			28	0	1	1	1
	8	Forum PRB	29	1	1	0	2
			30	0	1	1	1
			31	0	1	1	1
			32	0	1	1	1
	10		37	1	0	1	2

PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU		Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	38	1	1	1	1
			39	0	1	1	1
			40	0	0	1	1
	11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	41	1	1	1	2
			42	1	1	1	1
			43	0	1	1	1
			44	0	0	1	1
	12	Peta Kapasitas dan kajiannya	45	1	1	1	2
			46	1	1	1	1
			47	0	1	1	1
			48	0	0	1	1
	13	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	49	1	0	1	2
			50	1	1	1	1
			51	0	1	1	1
			52	0	1	1	1
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	53	1	0	1	2
			54	1	1	1	1
			55	0	1	1	1
			56	0	1	1	0
	15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	57	1	1	1	2
			58	1	1	1	1
			59	1	0	1	1
			60	0	1	1	1
	16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	61	0	1	1	2
			62	0	0	1	1
			63	0	0	1	1
			64	0	0	0	0
	17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	65	1	1	1	2
			66	1	1	1	1
			67	1	1	1	0
			68	0	0	0	0
	18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	69	1	0	0	1
			70	1	1	0	0
			71	1	1	0	0
			72	0	1	0	0
	19		73	1	0	0	2

		Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	74	0	1	0	1
			75	0	1	0	1
			76	0	1	0	1
	20	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	77	1	1	1	2
			78	1	1	1	1
			79	0	1	1	1
			80	0	1	1	1
	21	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	81	1	0	1	2
			82	1	1	1	1
			83	1	1	1	1
			84	0	0	0	0
	22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	85	0	1	1	2
			86	0	0	0	0
			87	0	0	0	0
			88	0	1	1	0
	23	Penyimpanan/pegudang Logistik PB	89	0	1	1	2
			90	0	0	0	0
			91	0	1	1	0
			92	0	1	1	0
PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	29	Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	113	1	1	1	2
			114	0	1	1	1
			115	0	1	1	1
			116	0	0	0	0
	31	Desa Tangguh Bencana	121	1	0	1	2
			122	1	0	1	1
			123	0	1	1	1
			124	0	0	0	1
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA							
PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	48	Rencana kontijensi banjir	189	1	0	0	1
			190	0	0	0	0
			191	0	0	0	0
			192	0	0	0	0
	52	Rencana Kontijensi karkahut	205	1	1	1	2
			206	0	0	0	1

		207	0	0	0	0
		208	0	0	0	0
61	Penentuan Status Tanggap Darurat	241	1	1	1	2
		242	1	0	0	0
		243	0	1	1	0
		244	0	0	0	0
62	Penerapan sistem komando operasi darurat	245	1	1	1	2
		246	0	1	1	1
		247	0	0	0	0
		248	0	0	0	0
63	Pengeralahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	249	1	1	1	2
		250	0	1	1	1
		251	0	1	1	1
		252	0	0	0	0
64	Pengeralahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	253	1	1	1	2
		254	0	1	1	1
		255	0	1	1	1
		256	0	0	0	0
67	Penghentian status Tanggap Darurat	265	0	0	0	1
		266	0	0	0	0
		267	0	0	0	0
		268	0	0	0	0
PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	269	1	1	2
			270	0	0	0
			271	0	0	0
			272	0	0	0
	69	Pemulihan infrastruktur penting	273	0	0	0
			274	0	0	0
			275	0	0	0
			276	0	0	0
	70	Perbaikan rumah penduduk	277	0	0	1
			278	0	0	1
			279	0	0	1
			280	0	0	1
	71	Pemulihan Penghidupan masyarakat	281	1	0	0
			282	0	0	0
			283	0	0	0
			284	0	0	0

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tabel sebelumnya, selanjutnya dilakukan penyajian ringkasan capaian kinerja sasaran strategis BPBD Kota Pontianak dalam bentuk perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	52,21%	-	63,97%	66,18%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Penanggulangan Bencana yang diukur melalui indikator Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD menunjukkan peningkatan capaian pada tahun 2025. Realisasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 63,97% dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 66,18%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 52,21%. Adapun data realisasi tahun 2023 tidak tersedia sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja pada tahun tersebut.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	52,21	66,18	69,12	95,74

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target capaian pemenuhan IKD pada Tahun 2025 adalah sebesar 52,21% sementara realisasinya sudah melebihi target yaitu senilai 66,18%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026

nilai akhirnya adalah 69,12% artinya capaian ini sudah memenuhi 95,74% dari target Renstra sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.11
Realisasi Indikator Kinerja Utama 2025 dengan Target Nasional (jika ada)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	66,18%	-

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

Untuk Indikator Sasaran Strategis Pemenuhan 34 Indikator IKD, tidak ditemukan persamaan indikator di tingkat Nasional maupun Daerah sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya peningkatan kinerja pada tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, upaya-upaya perbaikan juga terus dilakukan guna mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis terhadap faktor penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan menjadi penting untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Adapun hasil analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Tabel Analisis Penyebab Peningkatan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	Adanya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan perhitungan dan	Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan FGD dengan anggaran yang ada untuk	Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta penguatan perencanaan program dan

			pemenuhan indikator IKD	peningkatan nilai IKD	kegiatan yang mendukung pemenuhan indikator IKD secara berkelanjutan.
--	--	--	-------------------------	-----------------------	---

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak didukung dengan program kerja yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan, yang di anggarkan dan tertuang dalam DPPA Tahun 2025. Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2025 sebesar Rp. 8.243.348.789,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.707.657.663,00 atau sebesar 81,37% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 7.545.847.899,- dengan realisasi sebesar Rp 6.085.816.342,00,- atau senilai 80,65% yang terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai dianggarkan Rp 4.568.325.925,- terealisasi sebesar Rp. 3.598.049.671,- atau 78,76%
 2. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp. 2.977.521.974,- terealisasi sebesar Rp. 2.487.766.671,- atau 83,55%
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 697.500.890,- terealisasi sebesar Rp. 621.841.321,- atau 89,15%.

Adapun realisasi program dan kegiatan anggaran BPBD Kota Pontianak tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran BPBD Kota Pontianak Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penanggulangan Bencana	1.174.241.670,00	836.903.547,00	71,27
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	816.807.770,00	751.702.196,00	92,03

3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.252.299.349,00	5.119.051.920,00	81,87
	TOTAL	8.243.348.789,00	6.707.657.663,00	81,37

Sumber : BPBD Kota Pontianak 2025

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). Berdasarkan penjabaran pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan 1 (satu) Tujuan Strategis OPD yaitu **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** dengan predikat **Sangat Berhasil** dan 1 (satu) Sasaran Strategis OPD **Persentase pemenuhan 34 Indikator IKD** dengan predikat "**Sangat Berhasil**".
2. Persentase pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak adalah **107%** dan **127%** keduanya masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.
3. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Anggaran Belanja dengan target sebesar **Rp. 8.243.348.789,-** dan realisasi sebesar **Rp. 6.707.657.663,-** atau sebesar **81,37%**.

Rekomendasi

Capaian kinerja BPBD ini juga tercermin juga dari nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang meningkat dari 0,55 pada tahun 2025 menjadi 0,59 pada tahun 2025. Untuk meningkatkan nilai IKD BPD Kota Pontianak perlu menerapkan langkah-langkah strategis yang berfokus kepada 7 prioritas IKD yaitu :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;

6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
7. Penguatan sistem pemulihan bencana.

Untuk memperoleh nilai Indeks Ketahanan Daerah yang sesuai dengan target capaian, dan untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui 7 (tujuh) prioritas kebijakan tersebut, maka dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan, mengingat penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan juga dunia usaha. Penganggaran yang memadai dalam penanggulangan bencana juga menjadi faktor penting untuk tercapainya penanggulangan bencana yang terarah, cepat, terpadu dan menyeluruh.

Pontianak, 30 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK,**



Ir. R.M. NASIR, MT

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19690416 199603 1 005

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

Tahun Anggaran : 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Indeks Ketahanan Derah (IKD)	0,55	0,59	107
	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan 34 Indikator IKD	52,21%	66,18%	127

Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : Rp 8.243.348.789,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp 6.707.657.663,-

Pontianak, 30 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK,**



Ir. R.M. NASIR, MT

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19690416 199603 1 005

LAMPIRAN

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota





Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana





Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana







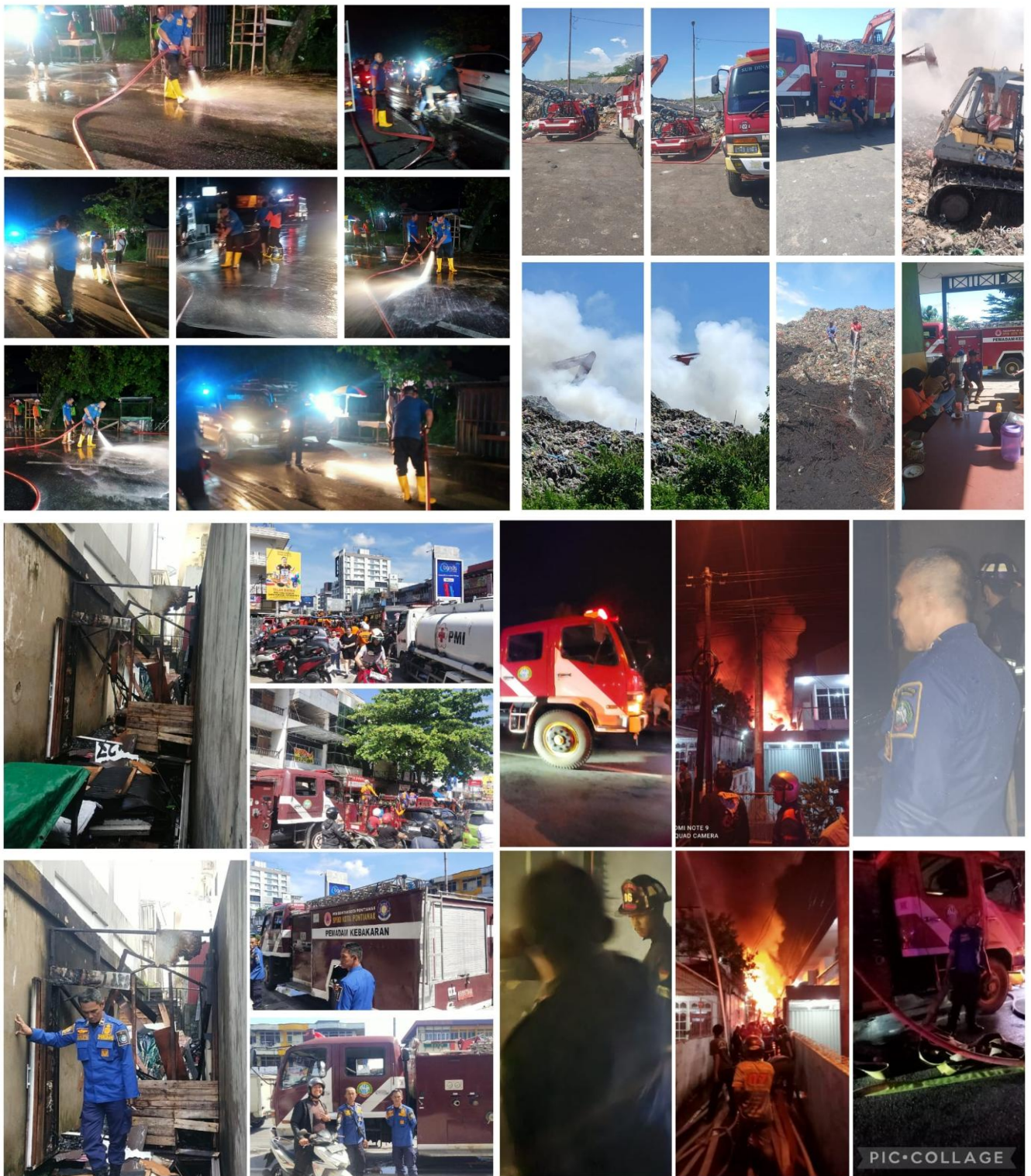






Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota







Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran







Administrasi umum, keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah



